

Alienasi Penduduk Asli dan Sikap Anarkis Berkelompok

Ilham Prisgunanto, S.S, M.Si¹

Abstrak:

Manusia berkelompok berangkat dari adanya fantasi-fantasi yang menyelimuti alam kognitifnya. Mereka yang termarginal biasanya berangkat dari kekecewaan terhadap sistem birokrasi yang dianggap lambat terhadap situasi. Alhasil mereka hanya akan tunduk pada aturan-aturan kelompok bukan Negara. Pada kenyataannya pers juga mampu memarginalisasikan kelompok, termasuk polisi. Isi muatan media massa sering memojokkan polisi, sehingga ada pendeskriditan pada kerja polisi. Hal inilah yang membuat muncul kelompok-kelompok anarkis berkelompok dalam konteks pengamanan dan penegakkan hukum yang berpola premanisme.

Kata Kunci

Marjinal, Polri, group dan ingroup, pers, konvergensi teori.

Pendahuluan

Salah satu fenomena yang marak saat ini menanggapi kasus keamanan dan penegakan hukum adalah munculnya kelompok-kelompok yang membawa muatan-muatan primordialisme kelompok. Sebagai makhluk yang normal, maka mereka akan sangat terpaut pada tata aturan kelompok dalam pandangan teori *in group* dan *out group* dalam memahami kelompok. Artinya mereka akan sangat taat pada aturan formal atau informal yang berlaku pada kelompok. Berdasarkan teori sistem, mereka akan menerima atau malah menolak anggota.

1 Ilham Prisgunanto, S.S, M.Si, Staf Pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta.

Teralienasi yang paling banyak dibicarakan orang banyak adalah menyoal akses informasi dan penguasaan terhadap agenda-agenda media massa. Dalam suasana pers liberal saat ini isu yang mencuat adalah kehendak untuk diliput, ditampilkan mereka dalam frame-frame rekaman media dan penyiaran. Pada kenyataannya orang-orang di daerah dan di kampung tidak dapat menikmati lonjakan dan globalisasi informasi yang ada.

Liputan surat kabar dan majalah yang tidak lengkap, penyiaran televisi dan radio yang hanya berkutat di kota-kota besar menimbulkan marjinalnya kelompok tertentu. Keterbatasan akses informasi adalah isu-isu menarik yang mencuat di era globalisasi informasi saat ini. Bayangkan di masa-masa ekonomi sulit terjadi jurang pemisah antara media massa dengan khalayaknya. Mereka yang miskin dan tidak memiliki uang, tidak akan mampu mengakses informasi. Bayangkan berapa biaya membeli buku, mengakses internet dan membaca surat kabar. Sedangkan untuk menonton televisi mereka harus mengorbankan waktu yang menurut mereka akan mengorbankan perolehan uang.

★ Kasus Tol Cipularang Bandung-Jakarta

Fenomena terbukanya jalur jalan bebas hambatan Cipularang antara Jakarta – Bandung – Purwakarta juga sebenarnya memberikan imbas cukup signifikan pada sisi politik praktis lokal Jawa Barat, khususnya Bandung. Kecenderungan komunikasi politik model apa yang terjadi pada orang Bandung? Bila mau jujur dengan terbuka dan mudahnya jalur tersebut menimbulkan guncangan pada pola kehidupan politik lokal orang Bandung. Tidak itu saja, tetapi juga akan menimbulkan rasa keterasingan dan benturan yang bisa menimbulkan kejahatan berkelompok anarkis dari masyarakat.

Benturan tersebut begitu kentara ketika ada banyak imigran yang masuk ke Bandung. Jadi tidak hanya menyoal benturan kebudayaan (*shock culture*) dari sisi sosiologis, namun lebih dari itu perubahan perspektif dan cara berpikir orang Bandung. Benturan budaya itu juga bukan hanya masalah klasik bahwa adat penduduk asli malas dan kalah dalam daya juang bertahan hidup bila dibandingkan pendatang. Pendeskriditan tersebut tergolong usang dan sudah tidak perlu di era globalisasi, seperti ini.

Apakah sedemikian menakutkan imbas imigran dari luar kota Bandung? Imbas langsung dengan kedatangan para imigran (pendatang) jelas yang paling nyata adalah kemacetan lalu lintas dan tingkat kepadatan penduduk pada hari libur dan besar. Bayangkan dengan kemudahan akses hanya dalam 2 (dua) jam dengan harga murah dari Jakarta mereka mampu mencapai Bandung. Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah orang-orang Jakarta tidak tergiur menetap di Bandung?

Bayangkan sudah muncul fenomena imigran yang bekerja di Jakarta dan tinggal di Bandung. Mereka berangkat ke Jakarta dari Bandung jam 5.00 WIB pagi dan pulang ke Bandung kembali dari Jakarta jam 17.00 WIB malam. Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat dan 'membludak' dengan kemudahan akses transportasi kedua kota tersebut. Bisa saja nanti akan muncul anggapan bahwa Bandung hanya tempat untuk tidur dan istirahat saja, tetapi berkarya dan bekerja di Jakarta.

Bertambah banyaknya jumlah imigran sedemikian di Bandung tentunya ini adalah potensi voter atau pemilih dalam kompetisi Pilkada mendatang. Diakui secara matematis memang dalam kuantitas angka, orang Bandung atau penduduk lokal lebih banyak dari imigran. Namun, apakah sedemikian dalam hitungan kasat mata potensi voter yang tidak terhitung?

Fenomena yang terjadi para imigran yang datang dan berbaur dengan masyarakat secara tidak sengaja membawa tata nilai dan kebiasaan mereka ke Bandung. Yang ditakutkan adalah penularan pola berpikir dan penjurangan terhadap paradigma berpikir orang Bandung. Perhatikan cara berkomunikasi dan pemilihan bahasa yang digunakan oleh orang Bandung saat ini. Buktinya, pernah suatu waktu didapati seorang pedagang berusaha menggunakan bahasa betawi dengan dialek sunda yang kental kepada pembeli yang kebetulan dari Jakarta.

Bagi orang dari Jakarta hal itu cukup menggelikan dan memprihatinkan bila ditilik lebih jauh. Alasan kuat si pedagang melakukan hal itu adalah upaya mempertinggi nilai barang dan menyamakannya dengan di Jakarta. Anggapan bahwa Jakarta lebih modern, maju dan gemerlap dengan harga-harga yang mahal. Tak pelak akhir dari cerita itu adalah harga barang bisa dijual dua atau tiga kali lipat dari sebelumnya.

Gejala yang terjadi di sini adalah klaim bahwa Jakarta lebih hebat, modern dan maju dibandingkan Bandung yang selalu tertinggal kuno dan konservatif. Lambat laun akan terjadi bahwa mereka yang bekerja di tanah Betawi adalah mereka yang modern, kosmopolit dan perlu ditiru. Ukuran sukses adalah mereka yang memiliki harta dari Jakarta, bukan dari Bandung yang dipenuhi kekentalan menguasai bahasa-bahasa Jakarta dengan dialek Betawi di dalamnya.

Gengsi penggunaan bahasa yang dianggap 'sepele' ini berimbas kepada perubahan paradigma bahwa Jakarta merupakan kiblat dari segalanya, terutama dari sisi politik. Dalam artian bahwa orang Bandung sudah terhegemoni dengan cara berpikir orang Jakarta dalam bayang-bayang cakar hedonis dan kapitalis.

Eksodus besar-besaran imigran dan terpengaruhnya orang Bandung adalah potensi besar nilai jual politik yang cukup menjanjikan bagi pemain politik. Hal inilah yang mungkin diincar oleh para pemain politik di Bandung saat ini. Seolah-olah Bandung sudah mulai kehilangan wajah asli kedaerahannya. Bila ini benar-benar terjadi maka kejadian alienasi penduduk lokal oleh pendatang, seperti kejadian anak Betawi di Jakarta yang tersingkir akan dialami juga oleh para anak priangan.

Pilkada Jakarta

Memahami gejala komunikasi politik orang Bandung sudah berubah, mudah sekali silahkan memperhatikan pemilihan jargon-jargon dan isu yang dilangsir di dalam Pilkada di Bandung yang akan datang. Apakah terpengaruh oleh jargon-jargon dan isu-isu yang dihembuskan dalam Pilkada di Jakarta satu tahun lagi. Bila terjadi, maka jelas sudah terjadi perubahan orientasi komunikasi politik orang Bandung. Namun sebaliknya bila yang keluar adalah isu-isu lokal dan menjunjung tinggi kepentingan asli orang Bandung, maka dapat dikatakan komunikasi politik orang Bandung masih kuat dan terjaga.

Kasus yang sangat kentara dalam memahami pengaruh imigran ini sudah terjadi sebelumnya pada Pilkada di Depok-Jawa Barat. Kota Depok yang berada bersebelahan langsung dengan Jakarta begitu nyata perubahan komunikasi politiknya. Dengan begitu berkuasanya imigran dari Jakarta, sehingga memudahkan pengaruh kepada penduduk asli Depok.

Bahkan silahkan lihat pakaian asli yang diumumkan oleh Pemkot Depok, begitu sangat Betawi modelnya. Padahal jelas-jelas budaya dan tradisi yang ada di Depok adalah Jawa Barat yang merupakan bagian dari Bogor, bukan Jakarta.

Tak pelak lagi bila dilihat pemain-pemain politik dari luar begitu mudah masuk. Bagi penulis memang tidak masalah, tetapi apa jadinya bila mereka (para pemain politik) itu tidak pernah memikirkan pembangunan yang sifatnya lokal. Tidak memperhatikan kualitas intelektualitas dan kadar kesehatan, kesejahteraan warga. Bagi mereka Pembangunan hanya sektor ekonomi dengan tidak memperhatikan kesenjangan dan teralienasinya penduduk asli.

Para pemimpin daerah karena bukan dari penduduk asli, melainkan imigran yang diregister menjadi asli itu memiliki agenda tersembunyi di balik Pilkada. Ketakutan bahwa Bandung hanya tempat tidur dan istirahat (seperti singgah saja) dan mengeruk keuntungan dari sana menjadi kenyataan. Yang dikhawatirkan adalah penduduk asli menjadi tersingkir dan termarginalisasi dari derap Pembangunan. Mereka menjadi beringas, mudah tersinggung dan frustrasi di tengah-tengah kemajuan yang pesat atas nama modernisasi. Dengan demikian potensi konflik dan 'pengkerdilan' orang Bandung sudah terjadi.

Hal ini merupakan sebuah peringatan besar bagi orang Bandung, sebab secara teoritik keberadaan Pilkada di Jakarta akan penuh dengan perang pesan dalam model *psywar*, provokasi dan agitasi. Imbasnya pasti menyebar dengan luas, apalagi dengan penggunaan media massa sebagai sarana komunikasi. Ketika genderang perang pesan dibunyikan, maka getaran dan letusannya akan lebih hebat dari bom atom, dan yang ditakutkan orang Bandung akan terimbas.

Terlebih dengan isu-isu program kota megapolitan yang akan menjadi 'gula-gula' yang mengiurkan bagi Calon Gubernur Jawa Barat yang akan datang. Dari sisi komunikasi organisasi mudah saja sebenarnya, bila ingin melihat apakah Pemda Jabar memihak penduduk asli, yakni dari kebijakan keputusan mereka yang sudah keluar. Bila muatannya sedikit dalam keberpihakan penduduk lokal dan lebih banyak kepentingan luar, berarti Pemda tidak pro penduduk lokal, meski yang menjabat penduduk asli.

Konteks marginalisasi ini akan menimbulkan sikap primordialisme yang kontroversi dalam kelompok tertentu. Imbas yang paling nyata dari pelarian fantasi masyarakat tersingkir adalah kelompok-kelompok yang bertindak anarkis. Mereka 'muak' dengan birokrasi dan negara, sehingga ingin keluar jalur dan bertindak semaunya dalam koridor-koridor yang mereka anggap benar dan sesuai dengan aturan kelompok.

Mistifikasi Wajah Polisi Dalam Tampilan Media Massa

Polisi kerap digambarkan buruk dan sepihak oleh media massa. Kondisi ini disinyalir berangkat dari ketidaktahuan pers akan kerja aparat penegak. Apakah hal ini menunjukkan preseden masih belum berjalannya program pemolisian masyarakat di Indonesia? Bagi banyak orang pernyataan tesis di atas bisa saja merupakan pembenaran (*reinforce*) terhadap pendapat miring atau malah sebaliknya, sebagai klaim pembelaan terhadap kinerja pasukan yang mengaku hukum sebagai panglimanya.

Apakah anda pernah menonton tayangan film atau sinetron Indonesia? Bagaimana polisi digambarkan di sana? Buruk atau subyek? Posisi polisi sering dianggap sebagai obyek, bukan subyek dalam penokohan film yang hanya berdurasi sekitar 30 (tiga puluh) menit itu. Polisi digambarkan sebagai pihak yang kaku, tidak jago 'berkomunikasi', seram, 'sanger' dan hadir hanya dalam kapabilitas penangkapan pelaku kejahatan dan patroli keamanan saja.

Misalnya perhatikan saja tayangan sinetron 'Malin Kundang' di salah satu stasiun swasta nasional, dimana salah satu pelakon berperan sebagai seorang anggota polisi Indonesia berpangkat perwira menengah. Dalam cerita digambarkan ia melakukan desersi (mungkir dari tugas) dan lari dengan salah satu tokoh (bekas istri si Malin Kundang) karena memiliki hati suci melawan sistem peradilan yang tidak berjalan. Pada cerita itu karena begitu licinnya si pelakon disersi itu, sehingga tidak ada sedikit juga polisi mampu mendeteksi, bahkan melakukan penangkapan.

Dalam dramatisasi sinetron tersebut polisi 'mangkir' itu akhirnya tertangkap, tetapi dengan catatan bukan karena ada usaha dari pihak kepolisian, melainkan adanya pelaporan dari petugas hotel dimana mereka menginap. Penangkapan juga tidak dilakukan oleh petugas Propam (Provost dan Pengamanan) khusus, melainkan petugas dari polsek biasa saja dengan

tidak sesuai prosedur yang ada. Seolah-olah 'mungkir' kerja, bukanlah kejahatan berat bagi anggota aparat kepolisian. Alhasil gambaran ini akan menggerogoti citra polisi dan imej mereka yang lebih lanjut mampu mempengaruhi kinerja dan penegakan hukum.

Memang media massa selalu menggambarkan polisi sebagai titik sentral penting dalam pengertian signifikansi politik negara lewat pemolisian. Artinya pihak media massa bukanlah pihak yang perlu disalahkan dalam menampilkan wajah polisi, karena pemahaman mereka terhadap polisi lewat dari program pemolisian yang ada. Meski ada pendapat miring pers juga tunduk pada sistem industri dalam kaitannya dengan proses komodifikasi pemberitaan. Maksudnya mereka mencari berita dalam hubungannya dengan news peg atau nilai dari apakah berita memiliki nilai jual?

Terlepas dari hal itu, berarti pembinaan Polri dalam hubungannya dengan pemolisian masyarakat belum berhasil. Menurut Robert Friedman terdapat tiga kategori bentuk pemolisian masyarakat yang bisa dilakukan, yaitu; pertama; kesadaran akan perlunya pemolisian berangkat dari masyarakat itu sendiri.⁴ Kondisi inilah yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemolisian masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat mengerti betul dan merasa perlu akan mengenal peran polisi. Biasanya hal ini dapat dibangkitkan dengan adanya stimulus yang diberikan oleh pers.

Kedua adalah peran campuran, bahwa antara polisi dan masyarakat sama-sama perlu melakukan pemolisian masyarakat. Diartikan bahwa ada campurtangan polisi dalam membangkitkan proses pemolisian masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat sudah ada pengertian terhadap polisi, tetapi masih agak sangsi dalam dirinya untuk mengerti polisi. Sedang yang ketiga adalah hanya polisi yang berperan aktif dalam melakukan pemolisian kepada masyarakat. Proses terakhir ini banyak terjadi di negara-negara berkembang dimana peran Negara begitu *powerfull* dalam mengarahkan sikap rakyatnya.

Kesalahan intepretasi tentang peran pemolisian ini berangkat dari pemahaman terhadap situasi yang ada. Seharusnya model ketiga pemolisian masyarakat di atas sudah tidak dilakukan oleh polri saat ini. Sebab model tersebut hanya cocok pada Negara-negara yang masih belum menganut model demokrasi. Mungkin memang era-era Pemerintahan masa orde baru

4 Robert Friedman. *Community Policing: comparative perspectives and prospects* (New York: Harvester, 1992)

cocok dengan model tersebut, tetapi bukan untuk saat ini. Yang cocok bagi iklim Negara Indonesia saat ini adalah model kedua dan pertama.

Dalam hal ini disarankan pada model kedua, dimana ada keterlibatan peran aktif dari masyarakat juga. Pemolisian masyarakat di sini jangan dipahami secara harfiah penciptaan komunitas-komunitas dalam hubungannya dengan pengubahan paradigma masyarakat. Sebab bila kita berpandangan tersebut yang muncul malah sebaliknya penciptaan komunitas-komunitas yang menggunakan ketakutan masyarakat akan kekuatan polisi. Mereka membaiat diri sebagai bagian dari polisi dan mendapatkan transfer kekuatan (*power*) di masyarakat. Tak heran akhirnya mereka leluasa melakukan kejahatan dan melanggar hukum dikaitkan mereka memiliki hubungan erat dengan aparat.

Lihat contoh beberapa ormas pemuda dan PAM SWAKARSA yang malah menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Karena oknum-oknum tersebut ternyata banyak melakukan tindakan semena-mena di masyarakat. Maka dapat dikatakan bayang-bayang militeristik di tubuh Polri di Indonesia masih begitu kental, sehingga kerja polisi begitu mudah dan mampu menimbulkan efek ketakutan luar biasa di masyarakat. Dalam mewujudkan dengan kekuatan sipil, polisi perlu dipahami bukan sebagai kekuatan yang berada di daerah 'sumir' (abu-abu) antara militer dan sipil. Polri diartikan berpola seperti bunglon yang bisa berubah-ubah, mereka bisa menjadi sipil di satu sisi atau militer. Hal inilah yang menyebabkan polisi begitu menyeramkan bagi masyarakat Indonesia.

Di sinilah tugas dari pemolisian masyarakat, yaitu mengubah pandangan miring masyarakat akan polisi dan menyamakan paradigma pemahaman mereka terhadap kinerja aparat hukum ini. Jadi tidak sesederhana mengumpulkan kelompok masyarakat tertentu, diberikan (HT) *Handy Talky*, keahlian semi polisi, bahkan diberikan izin menggunakan senjata.

Menyoal permasalahan pemolisian ini Amerika Serikat sebagai Negara yang penganut demokrasi liberal juga mengalami hal yang sama. Robert Reiner dalam menyebutkan kerja polisi dianggap suatu mistifikasi (aneh) di tengah-tengah masyarakat.⁵ Di satu sisi mereka bisa menjadi kekuatan yang berangkuhan dengan masyarakat, di lain pihak malah terlihat berseberangan

5 Robert Reiner .the Politics of the Police (London: Sussex: Harvester Press, 1985)

dalam keperluan tugas. Pers adalah pihak ketiga yang mempengaruhi perubahan signifikan konsepsi pendapat rakyat dalam memahami polisi.

Satu yang perlu diakui bahwa peran polisi begitu penting dalam keperluan mengukur tingkat demokratisasi dalam penerapan supremasi hukum di Negara tersebut. Polisi adalah aspek integral dari representasi masyarakat yang diatur oleh hukum. Mereka secara signifikan bertindak sebagai agen salah satu agen penegakan hukum dan keadilan dalam amanah mandat dari rakyat.

Sebenarnya permasalahan utama pemolisian masyarakat menurut Paul. M. Whisenand adalah komunikasi.⁶ Kebanyakan polisi menganggap remeh komunikasi, alhasil transfer komando menjadi kaku, dan mereka tidak mau melakukan difusi inovasi dalam kerja. Motivasi hubungan bawahan atasan akan sulit muncul dalam organisasi yang hanya mengandalkan pemeliharaan komando atasan, bukan pada sikap keterbukaan untuk melakukan perubahan dalam keperluan efektivitas peran.

Kebanyakan pimpinan polisi akhirnya terjebak pada degradasi peran dalam sistem komunikasi organisasi dalam keperluan transfer pesan dalam informasi. Kondisi ini disebabkan atasan 'enggan' terbuka dengan bawahan, demikian sebaliknya. Yang muncul hanya komunikasi searah aja dalam sistem komunikasi formal. Padahal bangsa Indonesia terkenal dengan masyarakat kolektivistik, yang mengutamakan hubungan kelompok. Oleh sebab itu keakraban dengan kelompok dalam keperluan pengakuan *in group* (satu kelompok) adalah perlu.

Oleh sebab itu adalah bijak bila Polri mulai melakukan pembenahan, terutama dalam sistem komunikasi internal mereka dahulu. Dengan demikian mereka bisa berkomunikasi ke eksternal dengan mudah dan proses pemolisian masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Bila sedemikian adanya, dalam beberapa dekade ke depan bila program pemolisian masyarakat sudah terwujud, tidak akan ada kesalahan pers, insan film dan teater dalam merepresentasikan wajah polisi seperti sekarang ini. ***

6 Paul. M. Whisenand .*the Managing of Police Organization* (New Jersey: Prentice-Hall, 1978)

Daftar Buku

Friedmann, Robert R (1992). *Community Policing: comparative perspectives and prospects*. New York: Harvester.

Prigunanto, Ilham (2005). Retorika Komunikasi Politik Indonesia Menjelang Pilkada (Sinyal Konflik dan Benturan Sosial Lewat Sosok). *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 063 Januari-Maret.

Prisgunanto, Ilham (2004). *Praktik Ilmu Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Teraju-Mizan.

Reiner, Robert (1985). *the Politics of the Police*. London: Sussex: Harvester Press.

Robert F. Bales (1979). *Interactional Process Analysis: a method for the study of small Groups* (reading, MA: Addison-Wesley, 1950); *Personality and interpersonal behavior* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970); Robert F. Bales, Stephen P. Cohen, and Stephen A. Williamson, *SYMLOG: a system for the Multiple Level Observation of Group* (London: Collier)

Stephen W. Littlejohn (1999). *Theories of human communication*. Belmont: Wadsworth.

Whisenand, Paul. M and R. Fred Ferguson (1978). *the Managing of police organization*. New Jersey: Prentice-Hall.